



**BerAKHLAK** # bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangsa

# RENCANA KERJA 2026



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BLITAR



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahunan ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah diselesaikan sesuai dengan RENJA tahun lalu dan kebijakan serta rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2026.

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama 5 (lima) tahun, dimana rencana kerja ini disusun dalam upaya memberikan arah / pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2026.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

**PIE KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG  
KABUPATEN BLITAR**

**IWAN DWIWINARTO, ST., M.M.T**

Pembina Tingkat I

NIP. 19770109 200312 1 003

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas .....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas .....	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas.....	26
2.3.1 Analisa SWOT .....	26
2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah .....	28
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42
<b>BAB III  TUJUAN DAN SASARAN DINAS</b>	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	50
3.3. Program dan Kegiatan.....	51
<b>BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ....</b>	<b>61</b>
<b>BAB V   PENUTUP</b>	
5.1. Catatan Penting yang perlu Mendapat Perhatian.....	77
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....	78
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	79

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 Kabupaten Blitar .....	12
<b>Tabel 2.2</b> Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar .....	25
<b>Tabel 2.3</b> Identifikasi Permasalahan Layanan Perangkat Daerah .....	30
<b>Tabel 2.4</b> Pencapaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	34
<b>Tabel 2.5</b> Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	41
<b>Tabel 2.6</b> Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan .....	44
<b>Tabel 2.7</b> Usulan Pekerjaan Tahun 2025-2029 Bidang Cipta Karya .....	44
<b>Tabel 3.1</b> Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari lima tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

**Gambar 1.1**

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota



Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya

Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Sesuai dengan perubahan yang sudah, sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini dimana setiap organisasi dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka diharapkan organisasi harus dapat menyusun dan membuat suatu Rencana Strategik (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.

Pembangunan di bidang sarana dan prasarana mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting sebab menyangkut tugas pokok dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan seperti tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional.

Perumusan kebijaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana meliputi perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase dan pelengkap jalan serta bangunan gedung dan penataan ruang.

Dalam pembangunan di bidang sarana dan prasarana (jalan, jembatan, sumber daya air, drainase dan sisem persampahan regional serta bangunan gedung dan penataan ruang), strategi yang harus dipakai adalah strategi pembinaan yang menampung secara serasi dan seimbang atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Adapun pendekatan yang dipergunakan diantaranya :

- Pendekatan pelayanan yaitu tugas pembinaan yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat pengguna sarana dan prasarana (jalan, jembatan dan saluran irigasi).
- Pendekatan pengembangan wilayah yaitu mengharapkan suatu pengembangan wilayah dan pembangunan / peningkatan daerah baru dengan

membuat/membangun sarana dan prasarana baru yang sebelumnya tidak ada atau belum berkembang.

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, pembangunan di bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Blitar harus selalu didukung dengan dana sehingga dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Semua itu diarahkan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang dipakai sebagai dasar hukum dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025;
5. Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Blitar 2021 - 2026;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar;
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2025 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Pada dasarnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Blitar pada Tahun 2026 dengan tema RKPD yaitu “Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah” melalui Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Penunjang Sektor-Sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan pembangunan di bidang jalan, jembatan, irigasi, bangunan gedung dan penataan ruang, dalam upaya untuk meningkatkan kualitasnya.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai pedoman bagi unit kerja terkait dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan program dan penganggaran yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, sebagai upaya untuk memenuhi pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air, pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan penataan ruang.
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi, baik awal sampai akhir pelaksanaan program, sehingga memudahkan perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS**

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

#### 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dan sebagainya.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu - isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

### **BAB V PENUTUP**

Memuat catatan penting dan kaidah pelaksanaan yang perlu mendapatkan perhatian pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

### 5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2026 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Blitar.

### 5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2026.

### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2026.

## BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

---

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Terdapat 11 (sebelas) program yang menjadi garapan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar pada tahun 2025. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang bina marga dan penataan ruang serta tugas pembantuan di Kabupaten Blitar, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja dari instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar pada tahun 2025, termasuk kategori sangat berhasil.

Berikut ini terdapat tabel evaluasi pelaksanaan realisasi kinerja dan anggaran untuk Tahun 2025 :



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025**  
**Kabupaten Blitar**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PADA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	100	100	100	100%	100	100	100%		
1	03	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan yang terselesaikan	100	100	100	100	100%	100	100	100%	
1	03	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	8	8	100%	8	8	100%
1	03	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	5	100%	5	5	100%
1	03	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang disusun	100	100	100	100	100%	100	100	100%
1	03	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82	63	62	46	74%	82	63,67	78%
1	03	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8	8	1596	1596	100%	8	537,33	6717%
1	03	01	2	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	12	12	12	100%	12	12	100%



1	03	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
1	03	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	11	9	9	100%	9	9,67	107%
1	03	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	97	61	97	97	100%	97	85	88%
1	03	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	10	10	10	100%	10	10	100%
1	03	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	9	9	9	100%	9	9	100%
1	03	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	9	6	6	100%	6	7	117%
1	03	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	51	27	27	100%	27	35	130%
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan BMD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
1	03	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	3	1	1	100%	1	1,67	167%
1	03	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	30	20	20	100%	20	23,33	117%
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang yang disediakan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
1	03	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122	12	12	12	100%	12	12	10%
1	03	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu tenaga pelaksana yang dibayarkan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
1	03	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	12	6	6	100%	12	10	83%
1	03	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	12	58	58	100%	12	27,33	228%



1	03	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	16	10	16	160%	1	11	1100%
1	03	01	2	09	0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	03	01	2	09	0011	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22	56	56	56	100%	22	44,67	203%
1	03	02				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>PERSENTASE IRIGASI KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK</b>	<b>69,03</b>	<b>69,47</b>	<b>71,23</b>	<b>71,23</b>	<b>100%</b>	<b>68,08</b>	<b>69,59</b>	<b>101%</b>
1	03	02	2	01		<b>Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (ws) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang bangunan Perkuatan Tebing yang dikelola/ ditangani</b>	<b>1</b>	<b>0,66</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>180%</b>	<b>1</b>	<b>60,55</b>	<b>6055%</b>
1	03	02	2	01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	30	1	100	180	180%	30	70,33	234%
1	03	02	2	02		<b>Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang jaringan irigasi yang dikelola</b>	<b>25,95</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>25,59</b>	<b>41,87</b>	<b>161%</b>
1	03	02	2	02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	15	0	3,39	9,08	268%	15	8,03	54%
1	03	02	2	02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3	0,405	4,5	4,53	101%	0	1,65	55%
1	03	02	2	02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1	0	2	2	100%	3	1,67	167%
1	03	02	2	02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,5	0,898	7,702	12,23	159%	1,5	4,88	325%
1	03	03				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMPEROLEH KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI</b>	<b>86,79</b>	<b>89,7</b>	<b>90</b>	<b>90,64</b>	<b>101%</b>	<b>86,79</b>	<b>89,04</b>	<b>103%</b>
1	03	03	2	01		<b>Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (spam) Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi</b>	<b>90</b>	<b>89,7</b>	<b>90</b>	<b>90,64</b>	<b>101%</b>	<b>90</b>	<b>90,11</b>	<b>100%</b>
1	03	03	2	01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	0	0	-	-	0%	0	0	0%



# RENCANA KERJA 2026

1	03	03	2	01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0	0	5	10	200%	0	3,33	0%
1	03	03	2	01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0	3145	19	19	100%	0	1054,67	0%
1	03	03	2	01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	223	4	9	225%	0	77,33	0%
1	03	04				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>CAKUPAN AREA PELAYANAN PERSAMPAHAN</b>	<b>19,15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>19,15</b>	<b>6,72</b>	<b>0%</b>
1	03	04	2	01		<b>Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas area pelayanan persampahan</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>0,67</b>	<b>67%</b>
1	03	04	2	01	0010	Pembangunan TPA TPST SPA TPS-3R TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1	0	1	1	100%	1	0,67	67%
1	03	05				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR LIMBAH DOMESTIK</b>	<b>96,2</b>	<b>88,94</b>	<b>1099</b>	<b>1215</b>	<b>111%</b>	<b>93,5</b>	<b>465,81</b>	<b>484%</b>
1	03	05	2	01		<b>Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</b>	<b>96,2</b>	<b>87,93</b>	<b>1.099</b>	<b>1215</b>	<b>111%</b>	<b>93,5</b>	<b>465,48</b>	<b>484%</b>
1	03	05	2	01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	500	356.754	1.099	1.215	111%	180	119383	23877%
1	03	06				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>PERSENTASE JALAN YANG MEMILIKI SALURAN DRAINASE</b>	<b>79,11</b>	<b>78,53</b>	<b>34576</b>	<b>26518,54</b>	<b>77%</b>	<b>79,11</b>	<b>8892,06</b>	<b>11240%</b>
1	03	06	2	01		<b>Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang saluran drainase yang ditangani</b>	<b>1232</b>	<b>1223699</b>	<b>34576</b>	<b>26518,54</b>	<b>77%</b>	<b>1232</b>	<b>417149,85</b>	<b>33860%</b>
1	03	06	2	01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	12000	24.587	34.576	26.518,54	77%	12000	21035,18	175%
1	03	08				<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>RASIO BANGUNAN GEDUNG (KECUALI RUMAH TINGGAL TUNGGAL DAN RUMAH DERET SEDERHANA) YANG LAIK FUNGSI</b>	<b>85</b>	<b>50</b>	<b>87</b>	<b>76</b>	<b>0%</b>	<b>84,6</b>	<b>70,2</b>	<b>83%</b>
1	03	08	2	01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupatenkota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Persentase gedung Kabupaten dalam kondisi baik</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>87</b>	<b>76</b>	<b>0%</b>	<b>40</b>	<b>51,67</b>	<b>115%</b>



1	03	08	2	01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	37	0	37	37	0%	37	24,67	67%
1	03	08	2	01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	200	0	50	39	0%	200	79,67	40%
1	03	09				<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>RASIO BANGUNAN BER-IMB PER SATUAN BANGUNAN</b>	<b>100</b>	<b>4,34</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>35,78</b>	<b>36%</b>
1	03	09	2	01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupate/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang sesuai dengan sistem penataannya	100	1,73	3	3	100%	100	34,91	35%
1	03	09	2	01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10	2	3	3	100%	10	5	50%
1	03	10				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PERSENTASE JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK</b>	<b>82,3</b>	<b>62,3</b>	<b>82,1</b>	<b>79,68</b>	<b>97%</b>	<b>82,3</b>	<b>74,76</b>	<b>91%</b>
1	03	10	2	01		Penyelenggaraan Jalan Kabupatenkota	Persentase jalan kabupaten yang ditangani	82,1	9,29	82,1	79,68	97%	82,1	57,02	69%
1	03	10	2	01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2,6	333,14	2,6	6,75	260%	2,6	114,16	4391%
1	03	10	2	01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	10879	80192	53.263	76.088,44	143%	10879	55719,81	512%
1	03	10	2	01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	24	4	3	3	100%	24	10,33	43%
1	03	10	2	01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	7	3	4	4	100%	7	4,67	67%
1	03	10	2	01	0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	5	0	2	2	100%	5	2,33	47%
1	03	10	2	01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	39.402	62.095	39.402	31,82	0%	39.402	33842,94	86%
1	03	10	2	01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	2.200	5	4,8	96%	5	736,6	14732%
1	03	11				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>RASIO TENAGA OPERATOR/TEKNISI/ANALISIS YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI</b>	<b>4,59</b>	<b>3,15</b>	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>	<b>100%</b>	<b>4,59</b>	<b>3,86</b>	<b>84%</b>
1	03	11	2	01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta pelatihan Tenaga Konstruksi yang terampil	50	3,15	100%	100%	100%	35	13,05	26%



1	03	11	2	01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	40	56	30	30	100%	35	40,33	101%
1	03	12				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PERSENTASE PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH SESUAI PERDA RTRW</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>85</b>	<b>88,33</b>	<b>104%</b>
1	03	12	2	01		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perda/ Perbup RTRW dan RRTR yang ditetapkan</b>	<b>1</b>	<b>66,67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>55,89</b>	<b>5589%</b>
1	03	12	2	01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	2	2	4	3	75%	2	2,33	117%
1	03	12	2	01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1	1	1	0	0%	1	0,67	67%
1	03	12	2	02		<b>Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koordinasi perencanaan tata ruang</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
1	03	12	2	02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten Kota	Jumlah Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	2	7	7	16	229%	2	8,33	417%
1	03	12	2	02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten Kota	Jumlah Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1	3	3	3	100%	1	2,33	233%

Program/ kegiatan memiliki kontribusi yang baik terhadap pencapaian kinerja di Tahun 2025. Target-target yang telah ditetapkan rata-rata sudah mencapai 100% bahkan lebih, hanya 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu rasio kepatuhan IMB, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar hanya sebagai pihak yang memberikan rekomendasi terbitnya IMB dan tidak punya kewenangan untuk melaksanakan penegakan ketertiban bangunan yang belum memiliki IMB, sehingga tidak bisa berkontribusi dalam peningkatan pencapaian target.

Pada indikator persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena usulan-usulan yang masuk ke Dinas dapat diakomodir dan didukung dengan pendanaan yang memadai. Sedangkan untuk indikator persentase bangunan panjang jaringan irigasi yang dikelola dapat tercapai karena dukungan capaian dari peningkatan jaringan irigasi permukaan, dimana pada saat penyusunan target kinerja sebanyak 3,39 m jaringan irigasi yang ditingkatkan, tapi pada realisasinya ada 9,08 m jaringan irigasi yang ditingkatkan.

Adapun capaian kinerja di beberapa sub kegiatan irigasi dapat mencapai target yang ditetapkan, selain karena beberapa usulan yang dapat diakomodir dan didukung oleh ketersediaan dana juga semua tak lepas dari kontribusi beberapa pihak baik internal dinas maupun pihak ketiga (rekanan).

Pada capaian kinerja pemenuhan saluran drainase dapat tercapai baik dari indikator program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan, hal ini karena pada saat perubahan anggaran terdapat banyak usulan saluran drainase baik dari aspirasi maupun dari usulan prioritas yang masuk, sehingga dari dana yang ada mampu untuk mengakomodir usulan tersebut sehingga target kinerja bisa tercapai.

Pada tahun 2023 jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah sepanjang 1.279,37 km dengan presentase 82,1% dan tahun 2024 jalan kabupaten dalam kondisi mantap turun menjadi 1.165,308 km atau 79,68%. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan anggaran. Adapun capaian dari masing-masing sub kegiatan rata-rata dapat tercapai, hal ini dikarenakan banyaknya usulan yang masuk menjelang

perubahan RKPD Tahun 2024 dan adanya ketersediaan dana yang mampu mengakomodir usulan-usulan tersebut. Namun untuk pembangunan jalan masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan dikarenakan karena prioritas penanganan jalan masih kepada penanganan jalan rusak khususnya wilayah Blitar Selatan.

Target jembatan yang dibangun tahun 2023 sebanyak 9 unit, dan terealisasi pembangunan jembatan adalah sejumlah 4 unit. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan pada tahun 2024 ini menargetkan 3 unit jembatan yang direhab, dan jumlah yang terealisasi sejumlah 3 unit. Adapun rehabilitasi jembatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Jembatan Bojorejo
2. Rehabilitasi Jembatan Sumberingin - Jeding
3. Rehabilitasi Jembatan Sungai Mlalo Talun

Pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, pada tahun 2024 target jumlah gedung pemerintahan yang akan dibangun dan direhabilitasi adalah sejumlah 17 (tujuh belas) unit. Kegiatan ini dapat tercapai dikarenakan banyaknya kebutuhan pembangunan gedung yang menjadi prioritas dan diakomodir dengan ketersediaan dana. Adapun kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota sejumlah 17 (tujuh belas) unit adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Posyandu Kesehatan Jiwa Kecamatan Ponggok;
2. Rehabilitasi Kantor Camat Srengat;
3. Rehabilitasi Lansekap dan Tempat parkir Kejaksaan Negeri Blitar;
4. Rehabilitasi Ruang PTSP dan Interior Gedung Kejaksaan Negeri Blitar;
5. Rehabilitasi Kantor Camat Selopuro;
6. Rehabilitasi Tempat Parkir Dinas PUPR Kabupaten Blitar;
7. Pembangunan Pagar Makam Sidowayah Kecamatan Srengat;
8. Pembangunan Musholla DPRD Kabupaten Blitar;
9. Rehabilitasi Lansekap Kolam Renang Pendopo RHN;
10. Rehabilitasi POS Jaga TPS di Kabupaten Blitar (Wlingi dan Kesamben);
11. Rehabilitasi Interior Aula Kejaksaan Negeri Blitar;

12. Pemeliharaan Pagar Kantor Kodim Blitar ;
13. Pembangunan Paving Halaman Kantor Polsek Wlingi;
14. Rehabilitasi Pedopo Kecamatan Panggungrejo;
15. Pembangunan Ruang Baca Kejaksaan Negeri Blitar;
16. Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan Selorejo;
17. Pemeliharaan Ruang Satreskrim Polres Blitar

Pada kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis capaian tahun 2024 ini penyerapan anggaran mencapai 100% sehingga kegiatan dimaksud memenuhi target yang direncanakan.

Dari target rasio tenaga operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 4,59 dapat tercapai sebesar 11,57, hal ini disebabkan peminat/ peserta pelatihan tenaga konstruksi (Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi) melebihi target. Hal tersebut berpengaruh terhadap indikator persentase peserta pelatihan tenaga konstruksi yang terampil dengan capaian sebesar 11,57%.

Berdasarkan Permen Agraria/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021, Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara umum harus melalui beberapa tahap antara lain Penyusunan Peta Dasar, Penyusunan Materi Teknis dan Peraturan Zonasi, Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Adapun penyusunan Rencana Tata Ruang yang harus dilalui sebagai berikut:

1. Penyusunan Peta Dasar

Peta Dasar divalidasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), terdiri dari sumber data (citra satelit) yang sudah orthorektifikasi dan juga Peta Dasar itu sendiri yang terdiri dari Batas Administrasi, Batas Wilayah Perencanaan (WP) atau Delineasi, Transportasi, Perairan, Garis Pantai, Bangunan dan Fasilitas Umum, Kontur, Penutup Lahan serta Toponim.

2. Penyusunan Materi Teknis dan Peraturan Zonasi

Penyusunan Materi Teknis terdiri dari buku rencana, fakta analisis dan album peta.

### 3. Kelengkapan Administrasi Persetujuan Substansi

Syarat persetujuan substansi harus melengkapi dokumen administrasi antara lain, SK Penetapan Delineasi, Berita Acara Kesepakatan Batas Kavling Minimum, Berita Acara Konsultasi Publik minimal 2(dua) kali, Berita Acara Perbatasan Kota/Kabupaten, Berita Acara Garis Pantai.

Dalam proses tersebut selain Rekomendasi Peta Dasar, terdapat proses pendampingan teknis dari Kementerian ATR/BPN yang kemudian dilanjutkan untuk melalui pembahasan lintas sektor antar Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan tata ruang tersebut telah mempertimbangkan semua aspek (komprehensif), seperti ekonomi, sosial, lingkungan, teknis, hukum, dan budaya. Output dari kegiatan tersebut yaitu Persetujuan Substansi oleh Kementerian ATR/BPN.

Pada Tahun 2024 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah menjadi peraturan bupati antara lain:

- RDTR WP Kanigoro
- RDTR WP Sutojayan
- RDTR WP Wlingi
- RDTR WP Srengat
- RDTR WP Garum

Pada Tahun 2025 terdapat Penyusunan Peta Dasar RDTR WP Kademangan, serta Penyusunan Materi Teknis RDTR WP Talun dan RDTR WP Kademangan yang saat ini sedang dalam proses pendampingan teknis oleh Kementerian ATR/BPN. Selain itu pada tahun 2025 ini terdapat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Materi Teknis Revisi RTRW, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 sudah mendapatkan Rekomendasi Peta Dasar. Dari proses penyusunan dokumen baik RTRW maupun RDTR membutuhkan pendampingan baik dari Kementerian ATR, dan BIG maupun pihak lain terkait yang berpengaruh terhadap indikator jumlah koordinasi yang dilakukan untuk penyusunan RTRW maupun RDTR, dimana jumlah tersebut tergantung dari undangan maupun kesiapan dokumen yang akan dikonsultasikan, dimana target dari dua indikator tersebut tidak tercapai. Pada Tahun 2026 terdapat rencana kerja lanjutan pendampingan RTRW Kabupaten Blitar dan

pendampingan proses persetujuan substansi RDTR WP Talun dan RDTR WP Kademangan. Selain itu juga terdapat penyusunan materi teknis RDTR WP Nglegok dan RDTR WP Sanankulon yang mana sudah disusun Peta Dasar yang divalidasi oleh BIG pada tahun 2025. Sedangkan penyusunan wilayah lainnya yaitu pada penyusunan Peta Dasar RDTR Wonodadi. Diharapkan dengan adanya rencana kegiatan ini dapat menjadi pedoman dalam pemberian izin pemanfaatan ruang dan mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Kementerian PUPR mendorong akses sanitasi aman melalui pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di beberapa wilayah di Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mengamanatkan terwujudnya 100% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 30% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman. Kabupaten Blitar dalam mewujudkan akses sanitasi layak dan aman, sejatinya tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur semata, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa aspek lain, salah satunya peningkatan keterlibatan masyarakat. Dukungan, komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh stakeholders, baik pemerintah daerah, akademisi, swasta, dan berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, diperlukan untuk mewujudkan penyediaan akses air bersih dan sanitasi untuk semua.

Kegiatan Sanitasi Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2026 memperoleh anggaran dari yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Secara keseluruhan jumlah total masyarakat yang terdampak dalam kegiatan Sanitasi Air Limbah adalah sebanyak 190 KK. Pendanaan dari DAU digunakan untuk pembangunan Jambanisasi di 16 Desa/Kelurahan yaitu Krisik, Selopuro, Kebonduren, Mandesan, Banggle, Pojok, Sawentar, Sidorejo, Tegalsri, Butun, Ngadirenggo, Popoh, Ngaringan, Karangrejo, Modangan, Soso. Target penerima BNBA di prioritaskan pada Keluarga Stunting, Keluarga Beresiko Stunting, Keluarga Miskin Ektrim, Penerima RTLH, dan Penderita Penyakit Menular. Disamping kegiatan fisik juga dilaksanakan penyiapan readiness criteria untuk pengusulan penganggaran Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja serta pembinaan

Operasi sarana dan prasarana Sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan akses aman sanitasi di kabupaten Blitar.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program / kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar adalah :

- a. Meningkatnya volume lalu lintas dengan beban melebihi kapasitas (overloading) pada ruas jalan;
- b. Sering terjadinya cuaca ekstrim (hujan) yang dapat mengurangi umur bangunan/ infrastruktur jalan yang mengakibatkan penurunan kondisi jalan;
- c. Terbatasnya kualitas maupun kuantitas SDM aparatur teknis dibidang Jalan dan Jembatan dibanding dengan beban volume pekerjaan yang ada;
- d. Masih kurangnya peralatan (alat berat) untuk menunjang kinerja pemeliharaan jalan;
- e. Perlunya peningkatan skill / kompetensi bidang irigasi khususnya tenaga lapangan dan mencukupi kebutuhan SDM di lapangan;
- f. Perlunya penyusunan Manual O&P sebagai standart pelaksanaan untuk tercapainya optimalisasi anggaran bidang Sumber Daya Air (SDA);
- g. Belum optimalnya pengelolaan data dan inventarisasi jaringan irigasi serta pemanfaatan data irigasi yang tersusun secara sistematis dan akurat, untuk pengendalian perencanaan pembangunan;
- h. Pentingnya rehabilitasi infrastruktur irigasi akibat penyusutan usia bangunan dan bencana alam dalam rangka keberlanjutan daya dukung sumber daya air;
- i. Perlunya peningkatan profesionalisme dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun solusi untuk meminimalisir permasalahan tersebut adalah :

- a. Melaksanakan program peningkatan kapasitas jalan yang meliputi : penentuan nilai Indeks Roughness Indeks (IRI) / Tingkat Kerataan Jalan, Standar Geometrik Jalan, peningkatan daya dukung jalan, lebar jalan dan kelengkapan fasilitas jalan (drainase/trotoar, pohon tepi jalan dan dinding penahan jalan);
- b. Mengoptimalkan sumber daya manusia/aparatur yang ada dengan pengendalian internal dan peningkatan keahlian teknis melalui pelatihan dan

- bimbingan teknis jalan dan jembatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengusulkan penambahan sumber daya manusia/aparatur teknis jalan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
- c. Pengadaan dan pemeliharaan alat berat penunjang kegiatan pemeliharaan jalan;
  - d. Penataan sumber daya manusia sebagaimana hasil Analisa Jabatan termasuk upaya rekrutmen tenaga ASN melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Non ASN khususnya untuk petugas Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi;
  - e. Penambahan anggaran untuk pembentukan HIPPA/P3A di seluruh wilayah Kabupaten Blitar dan juga melaksanakan penguatan Sistem Informasi Sumber Daya Air, penguatan SISDA, penyusunan Manual O&P, dan menampung aspirasi kendala/permasalahan terkait dengan irigasi;
  - f. Penerapan reward and punishment bagi aparatur maupun pelaksana pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas**

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik.

**Tabel 2.2**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2027	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks kepuasan Aparatur		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Skor Sakip OPD		√	60,45	60,65	60,75	60,85	60,45	60,65	60,65	60,85	
3	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	√	√	90,64	90,84	91,04	91,29	85,89	90,84	90,84	91,29	
4	Presentase RT berakses pengolahan air limbah domestik	√	√	89,19	93,50	96,20	97,70	72,7	93,50	93,50	97,70	
5	Rasio jaringan Irigasi		√	67,1	68,08	69,03	69,98	61,27	68,08	68,08	69,98	
6	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik		√	79,68	79,73	79,80	79,85	82,54	79,73	79,73	79,85	
7	Persentase pemenuhan saluran drainase yang berfungsi dengan baik		√	81,8	79,11	79,11	79,11	76,69	79,11	79,11	79,11	
8	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi		√	57,6	84,6	85	86	57,6	84,6	84,6	86	
9	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan		√	6,4	6,6	6,8	7,0	6,4	6,6	6,6	7,0	
10	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		√	3,83	4,59	4,59	4,59	3,83	4,59	4,59	4,59	
11	Persentase Pemanfaatan Ruang di Wilayah Sesuai PERDA RTRW		√	90,00	90,00	90,00	90,00	90	90,00	90,00	90,00	
12	Rasio area pelayanan persampahan		√	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	

Dari beberapa tabel capaian kinerja yang telah disajikan diatas, indikator-indikator yang dapat mencapai target yang telah ditentukan tentunya tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak. Dimulai dari kerjasama internal masing-masing bidang hingga seluruh karyawan dan karyawan dan kerjasama dengan pihak ketiga yang merupakan mitra kerja. Keberhasilan tersebut juga didukung dengan besaran anggaran yang dinilai cukup untuk mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

Di bidang Sumber Daya Air dengan indikator kinerjanya yaitu *Luas Sawah Beririgasi* dengan capaian sebesar 22.885 Ha.

Dari target RPJMD tahun 2024 luas Irigasi yang ingin dicapai adalah **31.866,88 Ha**, namun capaian luas irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar turun yaitu **22.885 Ha**.

Adapun dengan indikator kinerjanya yaitu *Cakupan Luas Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Daerah Yang Dibangun dan Direhabilitasi* dengan capaian sebesar 62,56%, keberhasilan tersebut dikarenakan adanya penanganan saluran irigasi di berbagai wilayah di Kabupaten Blitar sehingga mampu melebihi target yang telah ditetapkan.

*Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak, Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan dan Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman.* Sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia yaitu Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian akses air minum aman yang telah disesuaikan dengan metadata SDGs internasional adalah indikator 6.1.1.(c) yaitu "*Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum aman*". Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Definisi sumber air minum layak adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang terlindung, meliputi: (i) ledeng perpipaan (keran individual); (ii) ledeng eceran; (iii) keran umum/hydrant umum; (iv) terminal air; (v) penjual eceran; (vi) penampungan air hujan (PAH); (vii) mata air terlindungi; (viii) sumur terlindungi; dan (ix) sumur bor atau sumur pompa.

Dalam Kegiatan pengelolaan Air limbah Domestik capaian akses aman santasi kabupaten Blitar masih tertinggal jauh dari target provinsi maupun nasional sehingga perlu diupayakan dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tunja ( IPLT) di wilayah kabupaten Blitar . Jumlah Rumah Tangga dengan akses layak hanya 1,94% dari 459,648 Rumah tangga. Melalui penyiapan Readyness Criteria Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tunja ( IPLT) Kabupaten blitar , penyiapan anggaran konstruksiya , pengadaan sarana pengangkutan , pembuatan perundangan Air Limbah Domestik serta organisasi pengelola merupakan langkah awal untuk meningkatkan akses aman Sanitasi dengan target 3,62 % pada tahun 2029. Untuk akses Layak sanitasi dengan capaian 89,19 % perlu ditingkatkan menjadi 99,20% pada tahun 2029 dengan upaya pembangunan jambanisasi baik dari keuangan negara atau melibatkan pendanaan masyarakat.

Pada realisasi kinerja tahun 2024, *jalan kabupaten dalam kondisi mantap* turun menjadi 1.165,308 km atau 79,68%. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan kondisi jalan dari kondisi sedang ke kondisi rusak akibat adanya penanganan perbaikan jalan yang kurang signifikan, namun belum mampu mengakomodir pemeliharaan rutin pada jalan yang dalam kondisi baik sehingga terjadi penurunan persentase jalan dalam kondisi baik.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah Kabupaten Blitar merupakan bagian dari pelaksanaan Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang juga dituangkan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2026. Dalam penyusunan RDTR ini diharapkan menjadi penjabaran lebih teknis dari RTRW, dasar dalam penerbitan izin-izin pemanfaatan ruang, seperti Izin Lokasi atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Selain itu juga sebagai instrument pengendalian pemanfaatan ruang yang mana memiliki fungsi mengarahkan dan mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, menghindari konflik pemanfaatan lahan, serta mendukung investasi dan pelayanan public. Dengan penataan ruang yang baik, diharapkan lingkungan binaan dan alami dapat berfungsi optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas**

### **2.3.1 Analisa SWOT**

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar diperlukan identifikasi

berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi memerlukan persepsi yang sama dalam kebijakan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan - kebijakan dan program - program. Strategi disusun berdasarkan isu strategis dan sektoral Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. Kemudian dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) merupakan factor internal SKPD, sedangkan Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi SKPD dari luar. Berikut adalah analisis SWOT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

<b><u>Kekuatan (Strength)</u></b>	<b><u>Kelemahan (Weakness)</u></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang konstruksi sudah ada namun masih terbatas;</li> <li>2. Rekanan yang menjadi mitra kerja dinas sangat membantu pemenuhan capaian kinerja;</li> <li>3. Banyaknya jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar;</li> <li>4. Keadaan geografis di wilayah Blitar yang cukup variatif dari morfologinya berupa pegunungan, perbukitan, daratan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi jalan baik di Kabupaten yang masih minim yaitu sebesar 28,70% dari jumlah total jalan Kabupaten sepanjang 419,69 km;</li> <li>2. Masih banyaknya saluran air yang belum berfungsi dengan baik;</li> <li>3. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan/ rehabilitasi gedung baik itu usulan yang merupakan prioritas Pemerintah Daerah maupun usulan dari wilayah;</li> <li>4. Minimnya pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di tiap tahun;</li> <li>5. Kurangnya tenaga terampil untuk pengawasan;</li> <li>6. Belum terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dikarenakan adanya efisiensi anggaran;</li> <li>7. Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten di bidang infrastruktur;</li> <li>8. Rekanan yang kurang disiplin terhadap proses administrasi;</li> </ol>

<u>Peluang (Opportunity)</u>	<u>Ancaman (Threat)</u>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi yang baik dengan badan/ dinas terkait dalam hal pemenuhan data maupun informasi lainnya;</li> <li>2. Adanya keterbukaan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan melalui proses musrenbang maupun proposal yang masuk ke dinas;</li> <li>3. Adanya instansi maupun Perguruan Tinggi yang bisa sebagai mitra kerjasama diklat teknis untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;</li> <li>4. Akses ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sangat terbuka yang membuka peluang mendapatkan dana DAK, DID dan Bantuan Keuangan Provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesulitan interaksi antar wilayah (antar kecamatan, antar desa, dusun ke desa) karena fasilitas jalan dan jembatan yang belum tersedia maupun dalam kondisi kurang mantap;</li> <li>2. Masih banyaknya infrastruktur bangunan gedung pemerintah yang belum terpenuhi khususnya di ibukota Kabupaten;</li> <li>3. Banyaknya jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar;</li> <li>4. Pemenuhan air baku sangat diperlukan melalui pembangunan prasarana irigasi dan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi;</li> <li>5. Pemenuhan infrastruktur persampahan sangat diperlukan melalui Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.</li> <li>6. Keterbatasan akses air minum dan air limbah bagi masyarakat</li> </ol>

### **2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan di Kabupaten Blitar.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan sub urusan bina marga, sumber daya air, tata ruang, dan cipta karya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pembinaan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang

- e. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun permasalahan/hambatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas yaitu :

**Tabel 2.3**  
**Identifikasi Permasalahan Layanan Perangkat Daerah**

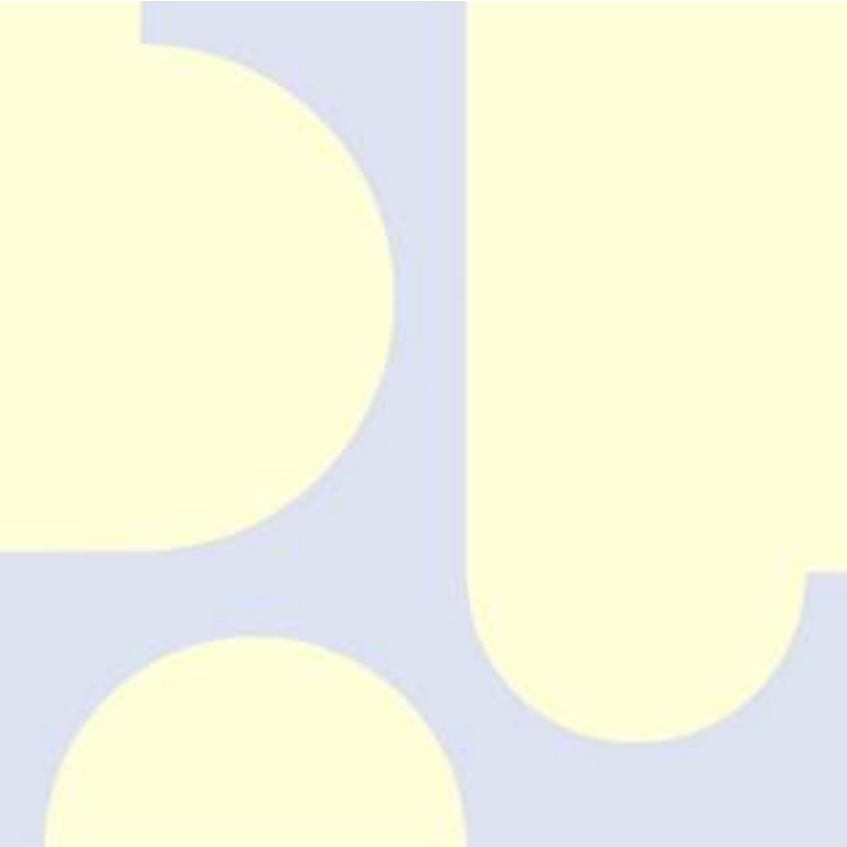
No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah								
1	Belum meratanya kualitas jaringan jalan	Banyaknya kondisi jalan yang rusak dan belum memenuhi standar	Kualitas konstruksi yang belum sesuai standar	Kondisi geologi yang membutuhkan penanganan khusus	Belum terpenuhinya standar kelengkapan dan fasilitas keselamatan jalan	Kelebihan muatan yang membebani jalan dan lemahnya pengawasan	Pemeliharaan jalan yang tidak responsive	Peralatan yang tidak memadai untuk pemeliharaan dan penanganan bencana alam	Saluran drainase tidak terkoneksi dengan baik	Koordinasi lintas sektor kurang baik	Pemanfaatan RUMIJA (Ruang Milik Jalan) belum memenuhi standar
2	Pengelolaan daerah irigasi yang belum optimal	Pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi yang belum optimal	Kurangnya suplai air baku	Kualitas konstruksi yang belum sesuai standar	Kondisi geologi yang membutuhkan penanganan khusus	Masih kurangnya regulasi terkait pengelolaan sistem irigasi	Rendahnya keterpaduan jaringan irigasi ditingkat primer, sekunder dan tersier	Terganggunya daerah irigasi rawa akibat banjir rob	Lemahnya kinerja kelembagaan pengelolaan daerah irigasi		
3	Minimnya penyediaan dan pemeliharaan jaringan irigasi	Belum optimalnya pemeliharaan jaringan irigasi	Tingginya sedimentasi pada intake jaringan irigasi	Rendahnya pemeliharaan jaringan irigasi	Rendahnya ketersediaan jaringan irigasi ditingkat sekunder dan tersier	Alih fungsi lahan pada daerah irigasi	Banjir/luapan sungai yang merusak daerah irigasi				
4	Belum terpenuhinya layanan air minum	Belum optimalnya perencanaan penyediaan akses air minum	Belum tersedianya dokumen rencana untuk sistem penyediaan air minum	Rendahnya kualitas perencanaan penyediaan air minum	Masih tingginya kebocoran air minum	Kurangnya tenaga ahli yang bersertifikat dan peralatan yang tidak memadai					
		Rendahnya kapasitas penyelenggara air minum	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia	Lemahnya koordinasi kelembagaan penyelenggara air minum							



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah									
			penyelenggara air minum									
		Belum optimalnya pemanfaatan kapasitas SPAM	Minimnya investasi untuk perluasan jaringan SPAM	Belum maksimalnya suplai air minum pada jaringan distribusi air minum sampai ke sambungan rumah	Rendahnya kemampuan bayar pengguna							
		Minimnya sumber pembiayaan alternatif	Tingginya pembiayaan infrastruktur	Kurangnya investasi untuk penyediaan infrastruktur								
		Masih rendahnya kualitas air minum	Pengelolaan dan distribusi air minum belum sesuai standar	Pemeliharaan jaringan yang kurang responsif								
5	Rendahnya akses aman sanitasi	Rendahnya ketersediaan dan kapasitas sarana dan prasarana akses air limbah terutama IPLT	Belum tersedianya dokumen perencanaan sanitasi	Belum adanya perundangan pengelolaan air limbah dan terpenuhinya standar sistem pengolahan air limbah domestik setempat dan kawasan	Lemahnya keterpaduan dan pemeliharaan sistem jaringan air limbah	Minimnya investasi pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	Perilaku masyarakat yang belum sadar dengan pengelolaan limbah yang berada di sekitarnya	Kurangnya personil pengelola dan belum adanya UPTD pengelola air limbah	Belum adanya bangunan IPLT sebagai pengolah lumpur tinja			
6	Belum memadainya penataan bangunan dan lingkungan	Minimnya fasilitas umum dan sosial	Belum terpenuhinya gedung olahraga skala nasional	Belum adanya islamic center skala provinsi sumut	Kurangnya optimalnya ruang terbuka di Kabupaten/Kota							
7	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang untuk mendukung investasi	Kinerja pengendalian pemanfaatan ruang yang buruk	Minimnya produk hukum daerah terkait pengendalian pemanfaatan ruang									



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah								
		Belum terpenuhinya kuantitas Rencana Tata Ruang (RTR)	Belum terpenuhinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab/Kota	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kab/Kota sedang masa integrasi/peninjauan kembali							
8	Masih rendahnya tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	Kurangnya kompetensi tenaga kerja konstruksi	Jumlah penelitian yang belum memenuhi kebutuhan konstruksi	Kerjasama antar lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan tenaga kerja konstruksi masih rendah	Minimnya pengawasan terhadap tenaga kerja konstruksi						



## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tema Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar tahun 2025 adalah *“Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah”*. Dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Blitar tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

1. Penguatan komoditas unggulan yang berorientasi industri, ekspor dan perluasan pasar;
2. Peningkatan SDM yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing serta penguatan perlindungan sosial;
3. Penguatan infrastruktur dan sarana - prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan dan menjaga stabilitas sosial politik dalam rangka pelaksanaan pemilu serentak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Blitar akan melaksanakan 11 program, 18 kegiatan dan 47 sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
5. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
7. Program Penataan Bangunan Gedung;
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
9. Program Penyelenggaraan Jalan;
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi ;
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Adapun target program yang akan dicapai pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET 2026
1	2	3	4	5
<b>1</b>	01.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PADA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>100</b>
	1.03.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan yang terselesaikan</b>	<b>100</b>
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET 2026
1	2	3	4	5
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5
	1.03.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>100</b>
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12
	1.03.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</b>	<b>100</b>
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	97
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27
	1.03.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan BMD</b>	<b>100</b>
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20
	1.03.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang yang disediakan</b>	<b>100</b>
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu tenaga pelaksana yang dibayarkan	12
	1.03.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET 2026
1	2	3	4	5
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22
<b>2</b>	01.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>PERSENTASE IRIGASI KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK</b>	<b>69,03</b>
	1.03.02.2.01	<b>Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (ws) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang bangunan Perkuatan Tebing yang dikelola/ ditangani</b>	<b>1</b>
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	30
	1.03.02.2.02	<b>Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang jaringan irigasi yang dikelola</b>	<b>25,95</b>
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	15
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,5
<b>3</b>	01.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMPEROLEH KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI</b>	<b>86,79</b>
	1.03.03.2.01	<b>Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (spam) Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi</b>	<b>90</b>
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	0
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET 2026
1	2	3	4	5
<b>4</b>	01.03.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>CAKUPAN AREA PELAYANAN PERSAMPAHAN</b>	<b>19,15</b>
	1.03.04.2.01	<b>Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas area pelayanan persampahan</b>	<b>1</b>
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA TPST SPA TPS-3R TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1
<b>5</b>	01.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR LIMBAH DOMESTIK</b>	<b>96,2</b>
	1.03.05.2.01	<b>Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</b>	<b>96,2</b>
	1.03.05.2.01.0010	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	500
<b>6</b>	01.03.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>PERSENTASE JALAN YANG MEMILIKI SALURAN DRAINASE</b>	<b>79,11</b>
	1.03.06.2.01	<b>Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang saluran drainase yang ditangani</b>	<b>1232</b>
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	12000
<b>7</b>	01.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>RASIO BANGUNAN GEDUNG (KECUALI RUMAH TINGGAL TUNGGAL DAN RUMAH DERET SEDERHANA) YANG LAIK FUNGSI</b>	<b>85</b>
	1.03.08.2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Persentase gedung Kabupaten dalam kondisi baik</b>	<b>45</b>
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	37
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	200
<b>8</b>	01.03.09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>RASIO BANGUNAN BER-IMB PER SATUAN BANGUNAN</b>	<b>100</b>
	1.03.09.02.01	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupate/Kota</b>	<b>Jumlah Bangunan Gedung yang sesuai dengan sistem penataannya</b>	<b>100</b>
	1.03.09.02.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10
<b>9</b>	01.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PERSENTASE JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK</b>	<b>82,3</b>

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026
1	2	3	4	5
	1.03.10.2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupatenkota</b>	<b>Persentase jalan kabupaten yang ditangani</b>	<b>82,1</b>
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2,6
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	10879
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	24
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	7
	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	5
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	39.402
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5
<b>10</b>	01.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>RASIO TENAGA OPERATOR/TEKNISI/ANALISIS YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI</b>	<b>4,59</b>
	1.03.11.2.01	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Jumlah peserta pelatihan Tenaga Konstruksi yang terampil</b>	<b>50</b>
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	40
<b>11</b>	01.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PERSENTASE PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH SESUAI PERDA RTRW</b>	<b>85</b>
	1.03.12.2.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perda/ Perbup RTRW dan RRTR yang ditetapkan</b>	<b>1</b>
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	2
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1
	1.03.12.2.02	<b>Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koordinasi perencanaan tata ruang</b>	<b>100</b>
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten Kota	Jumlah Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	2
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten Kota	Jumlah Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1

Adapun sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar adalah :

1. Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Berkualitas;
2. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan OPD;
3. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur SDA dengan dilihat dari rasio jaringan irigasi;
4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum dan air limbah;

5. Terwujudnya peningkatan kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten (kondisi dan penataannya) yang dapat dilihat dari sarana dan prasarana gedung milik Kabupaten yang sesuai standar serta rasio kepatuhan IMB;
6. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dengan melalui seberapa panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap dan terbangunnya saluran drainase yang berkualitas;
7. Terwujudnya sumber daya konstruksi yang profesional dengan diadakannya bimbingan teknis tenaga terampil konstruksi;
8. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang;
9. Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan.

Dengan indikator sasaran yang akan dicapai sebesar :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET	
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas infrastruktur pekerjaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten	-	Indeks Infastruktur Pekerjaan Umum	80,96	81,31	81,66
	Meningkatnya kualitas infrastruktur SDA	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	67,1	68,08	69,03
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan aman	90,64	90,84	91,04
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air limbah	Persentase rumah tangga berakses air limbah domestik layak dan aman	89,19	93,50	96,20
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan kabupaten	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	6,40	6,60	6,80
	Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan	Rasio area pelayanan persampahan per satuan penduduk	19,15	19,15	19,15
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	79,68	79,73	79,80
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase ketaatan pembangunan terhadap perencanaan tata ruang	90,00	90,00	90,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET	
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Nilai SAKIP perangkat daerah	60,45	60,65	60,75

Untuk target indikator kinerja kunci (IKK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

No.	IKK	Target RKPD 2026
1	Jumlah hari layanan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang /KKPR berusaha/ non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	20 hari
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	2,50%
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian	30,52%
4	Cakupan Air Minum Aman	4,04%

**Tabel 2.5**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026**  
**Kabupaten Blitar**

No.	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Blitar	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp. 9.305.196.858,-	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Blitar	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp. 9.305.196.858,-	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kab. Blitar	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	69,03	Rp. 26.750.000.000,-	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kab. Blitar	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	69,03	Rp. 26.750.000.000,-	
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Kab. Blitar	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase	79,11	Rp. 17.022.000.000,-	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Kab. Blitar	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase	79,11	Rp. 17.022.000.000,-	
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Kab. Blitar	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	85	Rp. 25.300.000.000,-	4	Program Penataan Bangunan Gedung	Kab. Blitar	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	85	Rp. 25.300.000.000,-	
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kab. Blitar	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	100	Rp. 294.543.200,-	5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kab. Blitar	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	100	Rp. 294.543.200,-	



No.	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Kab. Blitar	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	82,3	Rp. 51.184.372.700,-	6	Program Penyelenggaraan Jalan	Kab. Blitar	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	82,3	Rp. 51.184.372.700,-	
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Kab. Blitar	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	4,59	Rp 127.481.200,-	7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Kab. Blitar	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	4,59	Rp 127.481.200,-	
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Blitar	Persentase Pemanfaatan Ruang di Wilayah Sesuai PERDA RTRW	85	Rp 2.575.000.000,-	8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Blitar	Persentase Pemanfaatan Ruang di Wilayah Sesuai PERDA RTRW	85	Rp 2.575.000.000,-	
9	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Kab. Blitar	Cakupan area pelayanan persampahan	19,15	Rp 3.000.000.000,-	9	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Kab. Blitar	Cakupan area pelayanan persampahan	19,15	Rp 3.000.000.000,-	
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Blitar	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90%	Rp 425.000.000,-	9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Blitar	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90%	Rp 425.000.000,-	
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kab. Blitar	Persentase penduduk berakses air limbah domestik	96,2%	Rp 11.000.000.000,-	9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kab. Blitar	Persentase penduduk berakses air limbah domestik	96,2%	Rp 11.000.000.000,-	
<b>JUMLAH</b>					Rp 146.994.050.758,-	<b>JUMLAH</b>					Rp 146.994.050.758,-	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2025 - 2029, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani / memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme Musrenbang Kabupaten Blitar pada tahun 2025 sebagai usulan pekerjaan di Tahun 2026 sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2026**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b> Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Kota	Kab. Blitar	Persentase jalan kabupaten yang ditangani		MUSRENBANG
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b> Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (spam) Di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi		MUSRENBANG
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b> Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Presentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		MUSRENBANG

**Tabel 2.7**  
**Usulan Pekerjaan Tahun 2025 - 2029**  
**Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar**

No	Uraian	Dimensi	DED	Perencana	Pagu Usulan 2025	Rencana
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Masjid Al Amin Sekretariat	Masjit L 24 x 30 x 2 Lantai ,	2019	CV MATRA CIPTA	15.204.452.000	

No	Uraian	Dimensi	DED	Perencana	Pagu Usulan 2025	Rencana
1	2	3	4	5	6	7
2	Kantor Pemda Blitar	Kantor L 20 x 66 m x 4 Lantai	2019		53.856.000.000	
3	Gedung Serbaguna Negara Kelurahan Beru				3.000.000.000	
4	Kantor Kecamatan Udanawu	L 8,5 x 20 m x 2 Lt.	2020	CV ERA GUNA KARYA	4.660.250.000	
5	Pembangunan Arsip & Aula DLH	L 9 x P 20 m x 2 Lt.	2020	CV SKALA PATRIA	2.448.000.000	
6	Kantor Dinas Kesehatan		2022	CV MAHA MERU	26.000.000.000	
7	Pembangunan Kantor Dinas PPKBPPPA	L 12 x P 40 m x 2 Lt	2022		7.189.897.000	
8	Rumah Dinas Wakil Bupati		2022		8.000.000.000	
9	Kantor Dinas Sosial				20.000.000.000	
				<b>TOTAL</b>	<b>140.358.599.000</b>	

Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2026 didasarkan kepada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2025 - 2029 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program / kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

# BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN DINAS

---

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum Nasional bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN (2020 - 2025) yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Arah kebijakan pembangunan wilayah nasional meliputi 12 aspek, yaitu ;

- a. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah adalah Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020 - 2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain : (i) meningkatnya pemerataan;
- b. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender. Kebijakan pengarusutamaan gender akan meliputi: (1) Perkuatan komitmen Kementerian PUPR dalam pelaksanaan PUG; (2) Peningkatan integrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kementerian PUPR; (3) Peningkatan pelaksanaan “infrastructure for all” yang memenuhi

kebutuhan dasar (basic needs), dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan” bagi semua kelompok baik perempuan dan laki-laki-laki, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, generasi muda, suku-suku terasing dan kelompok rentan lainnya secara setara dan adil; (4) Peningkatan pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yang terdiri dari peningkatan di bidang: komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan (POKJA dan Focal Point) di tingkat pusat dan daerah; kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia sumber dana; data terpilah; alat analisa gender (Gender Analysis Pathway/GAP) untuk penyusunan PPRG; peran serta masyarakat dengan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan multi pihak; (5) Peningkatan lingkungan dan fasilitas kerja yang responsif gender; dan (6) Peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender terutama dalam aspek manfaat hasil-hasil pembangunan, termasuk melakukan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan PUG.;

- c. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur PUPR Tangguh Bencana. Arah kebijakan dalam pengarusutamaan infrastruktur PUPR tangguh bencana ditempuh upaya untuk mengakomodasi kondisi kebencanaan di Indonesia yang ditujukan untuk menghasilkan infrastruktur PUPR yang tangguh dan bisa mengurangi risiko bencana serta dapat mengurangi jumlah kerusakan infrastruktur dan lingkungan, yang akan dilaksanakan melalui: (1) Penyediaan NSPK dan peningkatan implementasi standar keamanan bangunan infrastruktur termasuk didalamnya antisipasi terhadap bencana seperti pada gedung, jalan, jembatan bentang panjang, dan bendungan; (2) Menerapkan SNI/uniform building code keamanan struktural bangunan tahan gempa pada jalan dan jembatan, dengan kategori safety critical objective yang tetap harus dapat beroperasi meskipun terjadi bencana dengan kategori kuat, sebagai jalur evakuasi dan jalur logistik; (3) Pembangunan infrastruktur konektivitas dengan memperhatikan zona rawan bencana, sesuai kondisi hazard dan

karakteristik wilayah rawan bencana; (4) Pembangunan infrastruktur transportasi yang sekaligus dapat difungsikan sebagai bangunan mitigasi bencana (misal: jalan yang dibangun sebagai tanggul di daerah pesisir untuk mengurangi dampak bencana banjir rob atau tsunami); (5) Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berada di lokasi rawan bencana; (6) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS); (7) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat; (8) Pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana; (9) Pengembangan teknologi ramah bencana pada setiap pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; (10) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data ketahanan kebencanaan infrastruktur PUPR; (11) Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (12) Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, longsor, banjir serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; (13) Peningkatkan kecepatan respon/tanggap bencana untuk pemulihan, dan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur PUPR pasca bencana.;

- d. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan melalui percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatanketerpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku. Arah kebijakan dalam rangka optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi adalah penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan

indeks risiko bendungan, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi. ;

- e. Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan, dirumuskan sebagai upaya untuk dijadikan acuan dalam pencapaian agenda pembangunan infrastruktur konektivitas 2020-2024. Arah kebijakan penyelenggaraan jalan adalah Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional, sementara strategi yang digunakan yakni Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yang dijabarkan dalam (i) Preservasi jalan; (ii) Pembangunan jalan dan jembatan; (iii) Penataan jalan nasional di Kawasan perkotaan; (iv) dan Pemenuhan Gap Funding melalui Skema Pembiayaan Alternatif ;
- f. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan;
- g. Arah Kebijakan dan Strategi Perencanaan Pembangunan Kewilayahan meliputi :
  - 1) Kebijakan Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah yang didukung oleh perangkat yang memadai termasuk mencakup panduan penyusunan rencana induk dan legalitas produk;
  - 2) Kebijakan Peningkatan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah;
  - 3) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
- h. Arah Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur. Kebijakan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan meliputi :
  - 1) Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan;

- 2) Peningkatan keterpaduan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS);
  - 3) Penataan dan peningkatan peran simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan;
  - 4) Peningkatan kontribusi pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam mendukung pencapaian Visium 2020–2024;
  - 5) Peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU;
  - 6) Pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel;
  - 7) Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya;
  - 8) Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan;
  - 9) Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (refinancing);
  - 10) Percepatan operasionalisasi BP Tapera;
  - 11) Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan, melalui: sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.
- i. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan Jasa Konstruksi. Arah kebijakan dan strategi pembinaan konstruksi ditujukan untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi (1) meningkatnya pengelolaan sumber daya air, (2) meningkatnya konektivitas jalan nasional, dan (3) meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi;

- j. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan SDM;
- k. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan yaitu yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja dan Keuangan;
- l. Arah Kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pembangunan, Kebijakan tata kelola penyelenggaraan pembangunan diarahkan pada upaya mendorong penerapan Inovasi Tata Kelola Administrasi Kementerian PUPR.

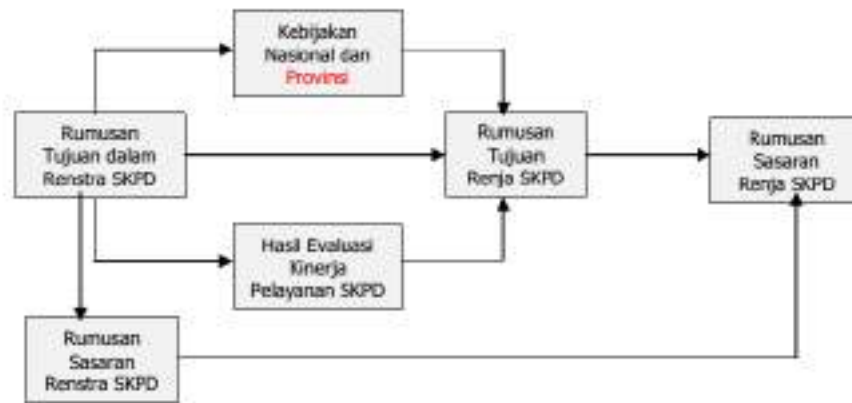
Dalam lima tahun mendatang (2025-2029), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu memantapkan pembangunan Jawa Timur yang adil sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang parsipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong. Sedangkan untuk arah kebijakan kewilayahan diarahkan ke peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan layanan prasarana transportasi.

Kabupaten Blitar yang termasuk dalam klaster Wilis Selatan dengan sektor unggulan dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang diarahkan pengembangan dari aspek infrastruktur berupa peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, pengendalian perubahan penggunaan lahan khususnya pada kawasan lindung, peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal diantaranya adalah Pelabuhan Prigi dan Pelayaran Perintis, dan Realignment jalur Malang-Blitar.

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.



**Gambar 3.1**

Bagan Alir Tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran OPD  
Kabupaten/Kota

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka tujuan yang ditetapkan mulai tahun 2026 adalah :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPD;
2. Meningkatkan layanan untuk aparatur yang menunjang kelancaran tugas Dinas;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Berpijak pada tujuan tersebut di atas, maka sasaran utama yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar adalah :

1. Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Berkualitas;
2. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan OPD;
3. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur SDA dengan dilihat dari rasio jaringan irigasi dan sistem jaringan drainase yang baik;
4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum dan air limbah;

5. Terwujudnya peningkatan kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten (kondisi dan penataannya) yang dapat dilihat dari sarana dan prasarana gedung milik Kabupaten yang sesuai standar serta rasio kepatuhan PBG;
6. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dengan melalui seberapa panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap;
7. Terwujudnya sumber daya konstruksi yang profesional dengan diadakannya bimbingan teknis tenaga terampil konstruksi;
8. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang;
9. Meningkatnya kualitas infrastruktur persampahan.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian visi Kabupaten Blitar yaitu *"Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya"*. Sedangkan misi Kabupaten Blitar meliputi:
  - a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas
  - b. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana
  - c. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat
  - d. Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan
2. Tugas dan fungsi dinas yang tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 99 Tahun 2022.

Adapun jumlah program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar akan melaksanakan 12 program, 20 kegiatan dan 59 sub kegiatan. Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program / kegiatan sebesar **Rp 151.567.527.953,00** (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).



**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
1	03	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PADA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Kab. Blitar	100	9.305.196.858	DAU		100	9.305.196.858
1	03	01	2	01		<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan yang terselesaikan</b>	Kab. Blitar	100	11.263.775	DAU		100	11.263.775
1	03	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	8	5.263.775	DAU		8	5.263.775
1	03	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	5	6.000.000	DAU		5	6.000.000
1	03	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	Kab. Blitar	100	6.039.016.163	DAU		100	6.039.016.163
1	03	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	82	5.907.016.163	DAU		82	5.907.016.163
1	03	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Blitar	8	126.000.000	DAU		8	126.000.000
1	03	01	2	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Blitar	12	6.000.000	DAU		12	6.000.000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
1	03	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</b>	Kab. Blitar	100	779.428.870	DAU		100	779.428.870
1	03	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	9	21.142.800	DAU		9	21.142.800
1	03	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	97	147.000.000	DAU		97	147.000.000
1	03	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Blitar	10	28.735.500	DAU		10	28.735.500
1	03	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	9	22.142.000	DAU		9	22.142.000
1	03	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Blitar	6	110.000.000	DAU		6	110.000.000
1	03	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	27	450.408.570	DAU		27	450.408.570
1	03	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan BMD</b>	Kab. Blitar	100	120.000.000	DAU		100	120.000.000
1	03	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Blitar	1	20.000.000	DAU		1	20.000.000
1	03	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Blitar	20	100.000.000	DAU		20	100.000.000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
1	03	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang disediakan	Kab. Blitar	100	1.877.488.050	DAU		100	1.877.488.050
1	03	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Blitar	122	170.000.000	DAU	122	170.000.000
1	03	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu tenaga pelaksana yang dibayarkan	Kab. Blitar	12	1.707.488.050	DAU	12	1.707.488.050
1	03	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</b>	Kab. Blitar	100	478.000.000	DAU	100	478.000.000
1	03	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Blitar	12	110.000.000	DAU	12	110.000.000
1	03	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Blitar	12	110.000.000	DAU	12	110.000.000
1	03	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Blitar	1	100.000.000	DAU	1	100.000.000
1	03	01	2	09	0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Blitar	1	58.000.000	DAU	1	58.000.000
1	03	01	2	09	0011	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Blitar	22	100.000.000	DAU	22	100.000.000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
1	03	02				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>PERSENTASE IRIGASI KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK</b>	Kab. Blitar	69,03	34.402.108.000	DAU, DAK		69,03	34.402.108.000
1	03	02	2	01		Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (ws) Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang bangunan Perkuatan Tebing yang dikelola/ ditangani	Kab. Blitar	1	1.500.000.000	DAU		1	1.500.000.000
1	03	02	2	01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Kab. Blitar	30	1.500.000.000	DAU		30	1.500.000.000
1	03	02	2	02		<b>Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang jaringan irigasi yang dikelola</b>	Kab. Blitar	25,95	32.902.108.000	DAU, DAK		25,95	32.902.108.000
1	03	02	2	02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kab. Blitar	15	3.600.000.000	DAU		15	3.600.000.000
1	03	02	2	02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Blitar	3	5.401.308.000	DAU, DAK		3	5.401.308.000
1	03	02	2	02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Kab. Blitar	1	1.000.000.000	DAU		1	1.000.000.000
1	03	02	2	02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Blitar	1,5	22.900.800.000	DAU		1,5	22.900.800.000



# RENCANA KERJA 2026

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
1	03	03				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMPEROLEH KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI</b>	Kab. Blitar	86,79	4.800.000.000	DAU		86,79	4.800.000.000
1	03	03	2	01		<b>Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (spam) Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi</b>	Kab. Blitar	90	4.800.000.000	DAU		90	4.800.000.000
1	03	03	2	01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Kab. Blitar	0	500.000.000	DAU		0	500.000.000
1	03	03	2	01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kab. Blitar	0	2.500.000.000	DAU		0	2.500.000.000
1	03	03	2	01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kab. Blitar	0	800.000.000	DAU		0	800.000.000
1	03	03	2	01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Blitar	0	1.000.000.000	DAU		0	1.000.000.000
1	03	04				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>CAKUPAN AREA PELAYANAN PERSAMPAHAN</b>	Kab. Blitar	19,15	3.000.000.000	DAU		19,15	3.000.000.000
1	03	04	2	01		<b>Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas area pelayanan persampahan</b>	Kab. Blitar	1	3.000.000.000	DAU		1	3.000.000.000



# RENCANA KERJA 2026

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
1	03	04	2	01	0010	Pembangunan TPA TPST SPA TPS-3R TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Kab. Blitar	1	3.000.000.000	DAU		1	3.000.000.000
1	03	05				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR LIMBAH DOMESTIK</b>	Kab. Blitar	96,2	836.000.000	DBH, DAU		96,2	836.000.000
1	03	05	2	01		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Kab. Blitar	96,2	836.000.000	DBH, DAU		96,2	836.000.000
1	03	05	2	01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	Kab. Blitar	500	836.000.000	DBH, DAU		500	836.000.000
1	03	06				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>PERSENTASE JALAN YANG MEMILIKI SALURAN DRAINASE</b>	Kab. Blitar	79,11	17.022.000.000	DAU		79,11	17.022.000.000
1	03	06	2	01		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang ditangani	Kab. Blitar	1232	17.022.000.000	DAU		1232	17.022.000.000
1	03	06	2	01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kab. Blitar	12000	17.022.000.000	DAU		12000	17.022.000.000
1	03	08				<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>RASIO BANGUNAN GEDUNG (KECUALI RUMAH TINGGAL TUNGGAL DAN RUMAH DERET SEDERHANA) YANG LAIK FUNGSI</b>	Kab. Blitar	85	50.185.701.969	DAU		85	50.185.701.969



# RENCANA KERJA 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi	
1	03	08	2	01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupatenkota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase gedung Kabupaten dalam kondisi baik	Kab. Blitar	45	50.185.701.969	DAU		45	50.185.701.969	
1	03	08	2	01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	37	50.130.501.969	DAU		37	50.130.501.969
1	03	08	2	01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	200	55.200.000	DAU		200	55.200.000
1	03	09				<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>RASIO BANGUNAN BER-IMB PER SATUAN BANGUNAN</b>	Kab. Blitar	100	11.600.336.039	DAU		100	11.600.336.039
1	03	09	2	01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupate/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang sesuai dengan sistem penataannya	Kab. Blitar	100	11.600.336.039	DAU		100	11.600.336.039



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
1	03	09	2	01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	10	11.600.336.039	DAU		10	11.600.336.039
1	03	10				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PERSENTASE JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK</b>	Kab. Blitar	<b>82,3</b>	<b>51.184.372.700</b>	<b>DAU, Opsen PKB</b>		<b>82,3</b>	<b>51.184.372.700</b>
1	03	10	2	01		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupatenkota</b>	<b>Persentase jalan kabupaten yang ditangani</b>	Kab. Blitar	<b>82,1</b>	<b>51.184.372.700</b>	<b>DAU, Opsen PKB</b>		<b>82,1</b>	<b>51.184.372.700</b>
1	03	10	2	01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kab. Blitar	2,6	15.250.000.000	DAU, Opsen PKB		2,6	15.250.000.000
1	03	10	2	01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kab. Blitar	10879	10.300.000.000	Opsen PKB		10879	10.300.000.000
1	03	10	2	01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Kab. Blitar	24	9.100.000.000	Opsen PKB		24	9.100.000.000
1	03	10	2	01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Kab. Blitar	7	650.000.000	Opsen PKB		7	650.000.000
1	03	10	2	01	0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Kab. Blitar	5	1.500.000.000	Opsen PKB		5	1.500.000.000
1	03	10	2	01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kab. Blitar	39.402	9.384.372.700	Opsen PKB		39.402	9.384.372.700
1	03	10	2	01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kab. Blitar	5	5.000.000.000	DAU, Opsen PKB		5	5.000.000.000



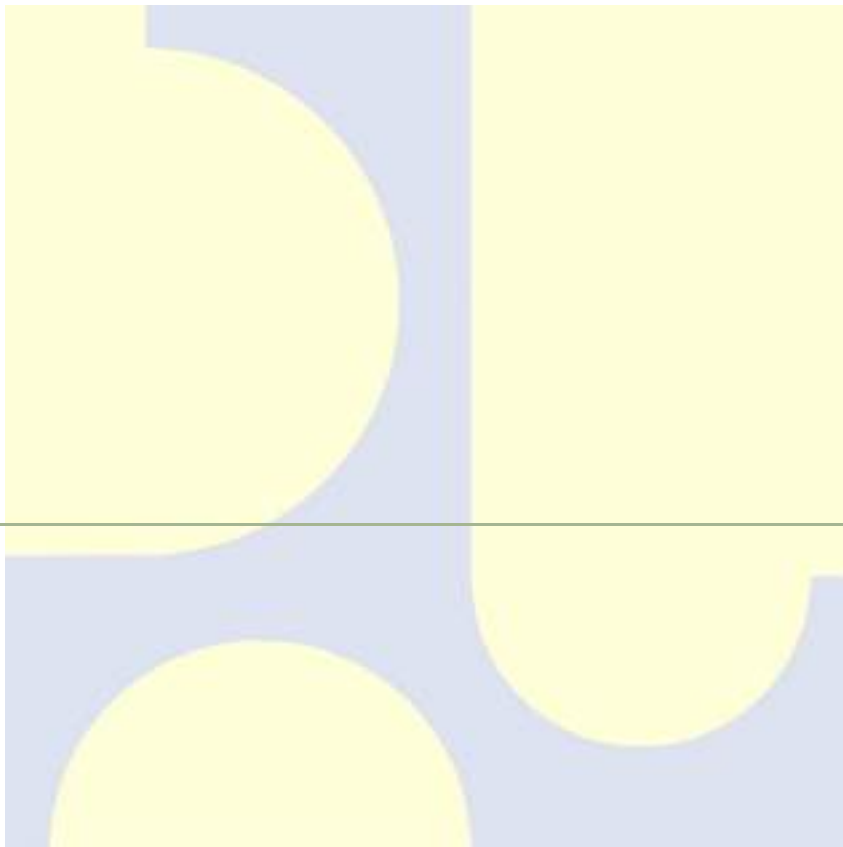
# RENCANA KERJA 2026

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
1	03	11				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>RASIO TENAGA OPERATOR/TEKNISI/ANALISIS YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI</b>	Kab. Blitar	4,59	116.767.067	DAU		4,59	116.767.067
1	03	11	2	01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta pelatihan Tenaga Konstruksi yang terampil	Kab. Blitar	50	116.767.067	DAU		50	116.767.067
1	03	11	2	01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kab. Blitar	40	116.767.067	DAU		40	116.767.067
1	03	12				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PERSENTASE PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH SESUAI PERDA RTRW</b>	Kab. Blitar	85	1.800.000.000	DAU		85	1.800.000.000
1	03	12	2	01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/ Perbup RTRW dan RRTR yang ditetapkan	Kab. Blitar	1	1.650.000.000	DAU		1	1.650.000.000
1	03	12	2	01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	2	775.000.000	DAU		2	775.000.000
1	03	12	2	01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	1	875.000.000	DAU		1	875.000.000
1	03	12	2	02		<b>Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koordinasi perencanaan tata ruang</b>	Kab. Blitar	100	150.000.000	DAU		100	150.000.000
1	03	12	2	02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten Kota	Jumlah Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	2	75.000.000	DAU		2	75.000.000



## RENCANA KERJA 2026

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
1	03	12	2	02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten Kota	Jumlah Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	1	75.000.000	DAU		1	75.000.000



# BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

---

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu - isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu - isu strategis tahun 2025 seperti tersebut pada bab terdahulu, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar diarahkan pada :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
6. Program Penataan Bangunan Gedung;
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
8. Program Penyelenggaraan Jalan;
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi ;
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



# RENCANA KERJA 2026

## RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BLITAR TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	PRAKORAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KEMERJA DAN NONRANGKA PENERIMAAN					KELOMPOK SAGARA	PRAKORAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2026	PAQU INDIKATIF (%)	LOKASI	SUMBER DANA	PESERTAS		TARGET	PAQU INDIKATIF (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							131.907.527.993,00								0,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						131.907.527.993,00									0,00	
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						131.907.527.993,00									0,00	
1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN KOTA						7.602.964.193,00									0,00	
1.01.01.01		[ Melengkapi kinerja pelayanan ke sekretariat untuk mendukung kinerja Perangkat Daerah ]	Tingkat Keypoint Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	7.602.964.193,00									0,00	
1.01.01.01.01		Pemenuhan Penganggaran dan Control Keuangan Perangkat Daerah						8.000.000,00									0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.01.01.01.001		Perubahan Dokumen Pemenuhan Perangkat Daerah						0 Dokumen									0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Perangkat Daerah					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00						0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.01.01.01.002		Analisis Kinerja Perangkat Daerah						0 Laporan									0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Jumlah Laporan Analisis Kinerja Perangkat Daerah					0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00						0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.01.01.01		Kelembagaan Perangkat Daerah						0,000.000,00									0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.01.01.01.000		Perbaikan Capaian Tunjangan ASN						0,000.000,00									0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Jumlah Orang yang mendapat Gaji dan Tunjangan ASN					0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	0,00	0,00						0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.01.01.01.001		Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran Sempit						0 Dokumen									0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran Sempit					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00						0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.01.01.01.002		Perubahan Pelaporan dan Analisis Anggaran Perangkat Daerah						0,000.000,00									0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			0					0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



# RENCANA KERJA 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REVISI/TA OPD	REKORSA CAPAIAN REVISI/TA OPD TAHUN 2024	PROJEKSI CAPAIAN TARGET REVISI OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PROJEKSI MELUJU RENCANA TAHUN 2027		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PASU INDIKATIF (Ry)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PASU INDIKATIF (Ry)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							7.602.044.103,00									0,00		
1.03.01.2.05		Administrasi Kaprogaswasi Pesisangul Daerah					0,00									0,00	DINAS PERCELURUAN UMUM DAN PENATAHAN RUMAH	
1.03.01.2.05.0001		Pengadaan Pakar dan tenaga ahli untuk kaprogaswasi																
			Jumlah Paket Pakar dan tenaga ahli untuk kaprogaswasi				1 Paket			DANA ALOKASI DAERAH (DAL)						0,00	DINAS PERCELURUAN UMUM DAN PENATAHAN RUMAH	
1.03.01.2.05.0002		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Good Governance Tingkat dan Fungsi																
			Jumlah Pegawai Mendapatkan Pelatihan dan Fungsi yang Meningkatkan Produktivitas dan Pelayanan				5 Orang			DANA ALOKASI DAERAH (DAL)						0,00	DINAS PERCELURUAN UMUM DAN PENATAHAN RUMAH	
1.03.01.2.05.0011		Menyediakan fasilitas implementasi pelayanan kesehatan lingkungan																
										DANA ALOKASI DAERAH (DAL)						0,00	DINAS PERCELURUAN UMUM DAN PENATAHAN RUMAH	
		[ Meningkatkan kinerja pelayanan di laboratorium untuk mendukung kinerja Perangkat Daerah ]	Tingkat Kapasitas Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	7.602.044.103,00								0,00		
1.03.01.2.08		Administrasi Umum Pesisangul Daerah						125.170.002,00									0,00	DINAS PERCELURUAN UMUM DAN PENATAHAN RUMAH
1.03.01.2.08.0001		Penyediaan perlengkapan kantor Lingkup pelayanan langsung ke masyarakat																
			Jumlah Paket perlengkapan kantor Lingkup pelayanan langsung ke masyarakat yang dibutuhkan				21 Paket	0.210.000,00		DANA ALOKASI DAERAH (DAL)						0,00	DINAS PERCELURUAN UMUM DAN PENATAHAN RUMAH	
1.03.01.2.08.0002		Penyediaan Perawatan dan Perbaikan kantor																
			Jumlah Paket Perawatan dan Perbaikan kantor yang dibutuhkan				91 Paket	27.200.000,00		DANA ALOKASI DAERAH (DAL)						0,00	DINAS PERCELURUAN UMUM DAN PENATAHAN RUMAH	
1.03.01.2.08.0003		Penyediaan Perawatan Perahu-Tangga																
			Jumlah Paket Perawatan Perahu-Tangga yang dibutuhkan				10 Paket	4.000.000,00		DANA ALOKASI DAERAH (DAL)						0,00	DINAS PERCELURUAN UMUM DAN PENATAHAN RUMAH	
1.03.01.2.08.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
										DANA ALOKASI DAERAH (DAL)						0,00	DINAS PERCELURUAN UMUM DAN PENATAHAN RUMAH	
1.03.01.2.08.0005		Penyediaan Barang Galian dan Pengangkutan																





# RENCANA KERJA 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2024	PENGALAMAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKEMBANGAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PESANGKAT DAERAH PESANGKANG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Foto / Berekam Dokumentasi Pengamatan yang Dihasilkan				8 Foto	10.000.000,00		DANA ALOKASI LURAH (DALU)	-	-			0,00	DINAS PERENCANAAN LURAH DAN PEMANTAUAN RENCANA
1.03.01.2.05.0001		Pengembangan Papan Informasi dan Komunikasi (PINFU)					0,00	40.141.770,00	Kab. Bina Sembus Kecamatan Sembus Kidul Desa	DANA ALOKASI LURAH (DALU)	-	-			0,00	DINAS PERENCANAAN LURAH DAN PEMANTAUAN RENCANA
1.03.01.2.07		Pengalaman Belajar Misi Ganda / Penyayang Unsur Pemerintahan Daerah					-	0,00			-	-			0,00	DINAS PERENCANAAN LURAH DAN PEMANTAUAN RENCANA
1.03.01.2.07.0001		Pengabdian Masyarakat														
			Jumlah Foto / Berekam yang Dihasilkan				1 Lembar	0,00	Kab. Bina Sembus Kecamatan Sembus Kidul Desa	DANA ALOKASI LURAH (DALU)	-	-			0,00	DINAS PERENCANAAN LURAH DAN PEMANTAUAN RENCANA
1.03.01.2.07.0006		Pengabdian Masyarakat dan Bina Lainsya														
			Jumlah Unit / Perbaikan dan Monev Lainsya yang dihasilkan				20 Unit	0,00	Kab. Bina Sembus Kecamatan Sembus Kidul Desa	DANA ALOKASI LURAH (DALU)	-	-			0,00	DINAS PERENCANAAN LURAH DAN PEMANTAUAN RENCANA
1.03.01.2.08		Pengabdian Masyarakat Penyayang Unsur Pemerintahan Daerah						1.140.110.000,00			-	-			0,00	DINAS PERENCANAAN LURAH DAN PEMANTAUAN RENCANA
1.03.01.2.08.0001		Pengabdian Masyarakat, Sumber Daya Manusia dan Lainsya														
							0,00	1.100.000,00		DANA ALOKASI LURAH (DALU)	-	-			0,00	DINAS PERENCANAAN LURAH DAN PEMANTAUAN RENCANA
1.03.01.2.08.0004		Pengabdian Masyarakat Penyayang Unsur Pemerintahan Daerah						870.110.000,00	Kab. Bina Sembus Kecamatan Sembus Kidul Desa	DANA ALOKASI LURAH (DALU)	-	-			0,00	DINAS PERENCANAAN LURAH DAN PEMANTAUAN RENCANA
1.03.01.2.08		Pengabdian Masyarakat Penyayang Unsur Pemerintahan Daerah						244.300.000,00			-	-			0,00	DINAS PERENCANAAN LURAH DAN PEMANTAUAN RENCANA
1.03.01.2.08.0001		Pengabdian Masyarakat Penyayang Unsur Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Anjungan Peningkatan Diri atau Kendaraan (Unit / Jarak) yang diupayakan dan dihasilkan Masyarakat				0 Unit	47.000.000,00	Kab. Bina Sembus Kecamatan Sembus Kidul Desa	DANA ALOKASI LURAH (DALU)	-	-			0,00	DINAS PERENCANAAN LURAH DAN PEMANTAUAN RENCANA
1.03.01.2.08.0001		Pengabdian Masyarakat Penyayang Unsur Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Anjungan Diri Optimalisasi atau Lapangan yang Diupayakan dan dihasilkan Masyarakat dan Pemerintah				00 Unit	00.000.000,00	Kab. Bina Sembus Kecamatan Sembus Kidul Desa	DANA ALOKASI LURAH (DALU)	-	-			0,00	DINAS PERENCANAAN LURAH DAN PEMANTAUAN RENCANA



# RENCANA KERJA 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEMATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKORAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELompok SASARAN	PERKERJAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.00.01	2.01.0006	Pemeliharaan Fasilitas dan Mesin Lainnya	Jumlah Fasilitas dan Alotri Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	40.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEREKUTIPAN LULUM DAN PINTASAN PUSKUS
1.00.01	2.01.0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				1 Unit	90.000.000,00	Kab. Bina, Serang, Kecamatan, Serang Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEREKUTIPAN LULUM DAN PINTASAN PUSKUS
								<b>7.882.064.193,00</b>							<b>0,00</b>	
1.00.01	2.01.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarens dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarens dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				22 Unit	43.000.000,00	Kab. Bina, Serang, Kecamatan, Serang Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEREKUTIPAN LULUM DAN PINTASAN PUSKUS
2.	1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	-	-			-	<b>2.800.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	
		[ Meningkatkan akses masyarakat terhadap higienitas ]	Peningkatan perilaku higienitas masyarakat	0,85	0,36	0,90	0,90	2.800.000.000,00							0,00	
1.01.02.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan/Manajemen Air pada Wilayah Sungai (M2) kelas 1 (Zona Darah) Kabupaten Roka						0,00							0,00	DINAS PEREKUTIPAN LULUM DAN PINTASAN PUSKUS
1.01.02.01.0010		Peningkatan dan Pemertayaan Kelembagaan Manajemen SDA Kawasan Roka Kabupaten Roka	Jumlah Kelembagaan Manajemen SDA Kawasan Roka Kabupaten Roka yang Dinetap dan Dipertayakan				00 Kelembagaan	0,00	Kab. Bina, Serang, Kecamatan, Serang Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEREKUTIPAN LULUM DAN PINTASAN PUSKUS
								<b>2.800.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	
1.01.02.01.0001		Dijawat dan Pemertayaan Bangunan	Jumlah Bangunan yang dipertayakan dan dijawat				1 Bangunan	0,00	Kab. Bina, Serang, Kecamatan, Serang Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEREKUTIPAN LULUM DAN PINTASAN PUSKUS
1.01.02.01.0101		Peningkatan Bangunan Perkuatan Teling	Peningkatan Bangunan Perkuatan Teling yang dipertayakan				0.000 KM	0,00	Kab. Bina, Serang, Kecamatan, Serang Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEREKUTIPAN LULUM DAN PINTASAN PUSKUS







# RENCANA KERJA 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2024	PELAKSIAN CAPAIAN TARGET RENCANA KERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KEBERJAAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN BIAYA RENCANA TAHUN 2027		PEBANGLAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PROINDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PROINDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sambungan Rumah yang dibangun untuk perbaikan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) dengan Pipisair				050.501	1.485.000.000,00	Kab. Bireu, Samudra, Kecamatan, Samudra KECIKUSA	DANA ALOKASI LURAH (DAL)	-	-	-		0,00	DINAS PERENCANAAN LURAH DAN PENATAAN KUMHID
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-			-	0,00						-	0,00	
		[Meningkatnya layanan persampahan]	Persentase sampah yang terkelola	10,15	10,15	10,15	10,15	0,00						-	0,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Perkotaan Kota	-	-			-	0,00						-	0,00	DINAS PERENCANAAN LURAH DAN PENATAAN KUMHID
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/PPA/TPS/BS														
			Kapasitas TPA/TPST/PPA/TPS/BS yang dibangun				1.700M3	0,00	Kab. Bireu, Samudra, Kecamatan, Samudra KECIKUSA	DANA ALOKASI LURAH (DAL)	-	-	-		0,00	DINAS PERENCANAAN LURAH DAN PENATAAN KUMHID
a.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	3.740.000.000,00						-	0,00	
								3.740.000.000,00						-	0,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik sesuai Daerah Perkotaan Kota	-	-			-	3.740.000.000,00						-	0,00	DINAS PERENCANAAN LURAH DAN PENATAAN KUMHID
	1.03.05.2.01.0020	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Tipe Lokal Skala Permukiman														
			Kapasitas Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Tipe Lokal Skala Permukiman yang dibangun				0.000M3	0,00	Kab. Bireu, Samudra, Kecamatan, Samudra KECIKUSA	DANA ALOKASI LURAH (DAL)	-	-	-		0,00	DINAS PERENCANAAN LURAH DAN PENATAAN KUMHID
	1.03.05.2.01.0024	Penyediaan Unit pengolahan setempat														
			Jumlah Rumah Tinggal yang memiliki fasilitas buang air besar (BAB) dengan sistem flush toilet atau unit pengolahan setempat sesuai yang dapat berupa length toilet dengan pengolahan terpadu/terpisah (SIP) atau unit pengolahan setempat sesuai				130 Rumah Tinggal	3.740.000.000,00	Kab. Bireu, Samudra, Kecamatan, Samudra KECIKUSA	DANA ALOKASI LURAH (DAL)	-	-	-		0,00	DINAS PERENCANAAN LURAH DAN PENATAAN KUMHID
a.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	3.284.004.000,00						-	0,00	



# RENCANA KERJA 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PELAKSANAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PROMOSI MAJU RENCANA TAHUN 2027		PETAINGKAT DAERAH PENYANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[ Meningkatkan kualitas sistem drainase perkotaan ]	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase	85	81,8	79,11	91	5.294.694.000,00							0,00	
1.01.00.2.01		Peningkatan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai atau Daerah Kumpulannya						5.294.694.000,00							0,00	DAKS PERLUAS LERAM DAN PENATAAN RUANG
1.01.00.2.01.0020		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditanggung				14516 Sistem Drainase Perkotaan	5.294.694.000,00	Kab. Karangasem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					0,00	DAKS PERLUAS LERAM DAN PENATAAN RUANG
a.	1.01.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						0,00							0,00	
								0,00							0,00	
1.01.07.2.01		Penyediaan infrastruktur pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Karangasem						0,00							0,00	DAKS PERLUAS LERAM DAN PENATAAN RUANG
1.01.07.2.01.0020		Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Sampah di Kawasan Strategis Kabupaten Karangasem														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki sistem pengelolaan sampah sesuai dengan standar				1 Rumah Tangga	0,00	Kab. Karangasem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					0,00	DAKS PERLUAS LERAM DAN PENATAAN RUANG
a.	1.01.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						795.170.000,00							0,00	
		[ Meningkatkan kualitas bangunan gedung ]	Pasio bangunan gedung yang laik fungsi	80	87,8	91,8	85	795.170.000,00							0,00	
1.01.09.2.01		Penyediaan dan Peningkatan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten Karangasem, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan (BAG) non Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						795.170.000,00							0,00	DAKS PERLUAS LERAM DAN PENATAAN RUANG
1.01.09.2.01.0021		Peningkatan dan Pemeliharaan														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Bangunan Gedung untuk Kabupaten Karangasem				1 Dokumen	890.000.000,00	Kab. Karangasem	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					0,00	DAKS PERLUAS LERAM DAN PENATAAN RUANG
1.01.09.2.01.0022		Peningkatan dan Pemeliharaan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung (RAB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Izin Operasional Bangunan Gedung (SIOBG), Nomor Teknik Perizinan Bangunan Gedung (NTPB), TSP Perizin ABG (TPA), TSP Perizin TSPB (TPB), Perizin, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung sesuai SIOBG													



# RENCANA KERJA 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKORDA OPD	REALISASI CAPAIAN REKOR OPD TAHUN 2024	PRAKARAI CAPAIAN TARGET REKOR OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARAI BALIK RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAUSE INDEKATIF (%)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAUSE INDEKATIF (%)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemadatan Perumahan Ringkasan Gedung (PRG), Semesta Lahir Ringkasan (SLR) Rumah Bersih (RSB) Ringkasan Gedung (SRG), Pemadatan Perumahan Ringkasan Gedung (PPRG), Tim Perumahan (TP), Tim Perumahan (TP), dan Pemadatan Perumahan Gedung (MPG) Kota Serang				30 (Dokumen)	222.170.000,00	Kab. Serang Semesta Kecamatan Serua Kertajati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BINA0 PERUMAHAN UMUM DAU PENATAAN RUMAH
n.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			-	0,00						-	0,00	
		[ Meningkatkan bangunan dan lingkungan yang sehat ]	Rasio Kesehatan Perumahan Ringkasan Gedung (PRG)	7	6,4	6,5	6,6	0,00							0,00	
	1.03.08.2.01	Pelaksanaan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00							0,00	BINA0 PERUMAHAN UMUM DAU PENATAAN RUMAH
	1.03.08.2.01.00-0	Perencanaan Rencana dan Pelaksanaan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					10 (Dokumen)	0,00	Kab. Serang Semesta Kecamatan Serua Kertajati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BINA0 PERUMAHAN UMUM DAU PENATAAN RUMAH
			Jumlah Dokumen Rencana dan Pelaksanaan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				-	0,00							0,00	
	1.03.08.2.01.00-0	Perencanaan dan pelaksanaan perbaikan bangunan dan lingkungan					10 (Daftar)	0,00	Kab. Serang Semesta Kecamatan Serua Kertajati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BINA0 PERUMAHAN UMUM DAU PENATAAN RUMAH
			Jumlah peningkatan bangunan gedung yang melaksanakan pemadatan dan lingkungan perumahan ringkasan dan lingkungan				-	125.134.789.850,00							0,00	
ix.	1.03.18	PROGRAM PEMELENGKARAN JALAN	-	-			-	125.134.789.850,00							0,00	
		[ Meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang tinggal di kawasan ]	Persentase peningkatan kemampolan jalan kabupaten	0,05	1,42	0,05	0,07	125.134.789.850,00							0,00	
	1.03.18.2.01	Pelaksanaan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	125.134.789.850,00							0,00	BINA0 PERUMAHAN UMUM DAU PENATAAN RUMAH
	1.03.18.2.01.00-0	Perencanaan Jalan Jalan					-	10.000.000.000,00	Kab. Serang Semesta Kecamatan Serua Kertajati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BINA0 PERUMAHAN UMUM DAU PENATAAN RUMAH
	1.03.18.2.01.00-0	Pembangunan jalan					-									



# RENCANA KERJA 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KERJA DAN KEMUDA PENCERAIAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU KENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN JAWAB
							TARGET 2026	PAUW INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAUW INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang jalan yang Dibangun dengan Perawatan				2,0 KM	20.000.000.000,00	Kad. Bina Sama Kecamatan Sama Kot. Dasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	DINAS PERENCANAAN URBAN DAN PENATAAN RUANG
1.00.10.2.01.002		Perawatan Jalan														
			Panjang jalan yang Dinukliskan				20402 KM	20.402.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	DINAS PERENCANAAN URBAN DAN PENATAAN RUANG
1.00.10.2.01.002		Perawatan Berkelas Jalan														
			Panjang jalan yang Diperbaiki Secara Jumlah				18073 KM	21.818.073.000,00	Kad. Bina Sama Kecamatan Sama Kot. Dasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	DINAS PERENCANAAN URBAN DAN PENATAAN RUANG
1.00.10.2.01.002		Perawatan Jembatan														
								6.040.000.000,00	Kad. Bina Sama Kecamatan Sama Kot. Dasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	DINAS PERENCANAAN URBAN DAN PENATAAN RUANG
1.00.10.2.01.002		Perawatan Berkelas Jembatan														
			Panjang jembatan yang Diperbaiki Secara Jumlah				5 Meter	4.000.000.000,00	Kad. Bina Sama Kecamatan Sama Kot. Dasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	DINAS PERENCANAAN URBAN DAN PENATAAN RUANG
1.00.10.2.01.002		Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				7 Meter	4.210.000.000,00	Kad. Bina Sama Kecamatan Sama Kot. Dasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	DINAS PERENCANAAN URBAN DAN PENATAAN RUANG
11	1.00.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KOMUNITAS</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>						-	<b>0,00</b>	
								<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	
	1.00.11.01	Penyediaan Jasa Perawatan Tanggul Sungai Komunitas						0,00							0,00	DINAS PERENCANAAN URBAN DAN PENATAAN RUANG
	1.00.11.01.001	Perawatan Tanggul Sungai Komunitas														
								0,00	Kad. Bina Sama Kecamatan Sama Kot. Dasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	DINAS PERENCANAAN URBAN DAN PENATAAN RUANG
12	1.00.12	<b>PROGRAM PENYELIDIKAN PENATAAN RUANG</b>	-	-	-	-	-	<b>1.800.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
		[ Meningkatkan kualitas penyelidikan penataan ruang ]	Perawatan penataan ruang sesuai perencanaan tata ruang	85	85	85	85	1.800.000.000,00						-	0,00	



# RENCANA KERJA 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKARAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEMBIKRAAN					KELOMPOK SASARAN	PEMBIKRAAN RAJU RENCANA TAHUN 2027		PENGINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.03.12.2.01		Peningkatan Kualitas Tesis Peningkatan (PTW) dan Rencana Aksi Tesis Rukung (PHTN) Kabupaten Kota	-	-			-	1.000.000.000,00				-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN UMUM DAN PELAYANAN MASYARAKAT
1.03.12.2.01.0001		Pelaksanaan Penetapan Substansi PTW Kabupaten Kota	Jumlah soal/penetapan substansi PTW Kabupaten Kota				1 Desember	400.000.000,00	Kab. Bina, Sempu Kecamatan, Sempu KalDesa	DANA ALYAS UMUM (DANU)	-	-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN UMUM DAN PELAYANAN MASYARAKAT
1.03.12.2.01.0002		Pelaksanaan Penetapan Substansi RCTN Kabupaten Kota	Jumlah dokumen administrasi penetapan substansi RCTN Kabupaten Kota				4 Desember	1.170.000.000,00	Kab. Bina, Sempu Kecamatan, Sempu KalDesa	DANA ALYAS UMUM (DANU)	-	-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN UMUM DAN PELAYANAN MASYARAKAT
1.03.12.2.02		Kelembagaan dan Kualitas Peningkatan Tesis Rukung dan Peningkatan Kualitas	-	-			-	180.000.000,00				-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN UMUM DAN PELAYANAN MASYARAKAT
1.03.12.2.02.0001		Peningkatan PTW Kabupaten Kota	Jumlah materi online dan offline PTW Kabupaten Kota				8 Desember	100.000.000,00	Kab. Bina, Sempu Kecamatan, Sempu KalDesa	DANA ALYAS UMUM (DANU)	-	-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN UMUM DAN PELAYANAN MASYARAKAT
1.03.12.2.02.0002		Peningkatan PTW Kabupaten Kota	Jumlah materi online dan offline PTW Kabupaten Kota				8 Desember	80.000.000,00	Kab. Bina, Sempu Kecamatan, Sempu KalDesa	DANA ALYAS UMUM (DANU)	-	-	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN UMUM DAN PELAYANAN MASYARAKAT
<b>JUMLAH</b>								<b>151.987.527.000,00</b>								<b>0,00</b>	



## BAB V

# PENUTUP

---

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2026 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan kebinamargaan yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. Semoga RENJA tahun 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

### **5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian**

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun 2026 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Blitar.

Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2026 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2023 - 2026.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2026 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

## **5.2 Kaidah - kaidah Pelaksanaan**

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2026 sebagai berikut:

- 1) Di dalam Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2026 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- 2) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2026 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Blitar dan Renstra Dinas).

### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
- c. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.



- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Blitar, Agustus 2025

**PIL. KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BLITAR**

**IWAN DWIWINARTO, ST., MM.T**

Pembina Tingkat I

NIP. 19770109 200312 1 003